



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

**LAPORAN KEUANGAN**  
**TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA**  
**ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31**  
**DESEMBER 2021 *AUDITED***



Jl. Veteran III No.2  
Jakarta 10110

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Sekretariat Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2021 *Audited* disusun dengan berpedoman pada PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Lembaga, dan PMK 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharap dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksud untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Jakarta, 27 April 2022

Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden,



Agus Widodo

NIP.196808141995031007

# DAFTAR ISI

## Laporan Keuangan Setwantimpres Tahun 2021 *Audited*

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab .....	iii
Rngkasan .....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	4
II. Neraca .....	5
III. Laporan Operasional .....	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	7
V. Catatan Atas Laporan Keuangan .....	8
A. Penjelasan Umum.....	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran ...	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....	22
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....	28
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas ....	32
F. Pengungkapan Penting Lainnya .....	34
VI. Lampiran	
A. Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara Tahun 2021 <i>Unaudited</i>	
B. Laporan SAKTI	

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, Tahun Anggaran 2021 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 27 April 2022

Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden,

Agus Widodo

NIP. 196808141995031007

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, Tahun Anggaran 2021 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 27 April 2022

Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden,



Agus Widodo

NIP. 196808141995031007

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2021 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp460.022,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp30.521.520.790,00 atau mencapai 96,56 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp31.610.023.000,00.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.772.297.874,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp780.644.068,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp1.867.780.056,00; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp123.873.750,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp7,176.049,00 dan Rp2.765.121.825,00.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp29.970.738.755,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(29.970.738.755,00). Kegiatan Non Operasional surplus sebesar Rp460.022,00 dan Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(29.970.278.733,00).

### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp2.215.432.790,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(29.970.278.733,00) dan koreksi atas reklasifikasi sebesar Rp(1.093.000,00) kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp30.521.060.768,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp2.765.121.825,00

### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 *Audited* disusun dan disajikan dengan basis akrual.

# I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Keuangan Setwantimpres Tahun 2021 *Audited*

## SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021		%thd ANGG	TA 2020 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
<b>PENDAPATAN</b>	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	460.022,00		2.888.250,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>460.022,00</b>		<b>2.888.250,00</b>
<b>BELANJA</b>	B.2				
<b>Belanja Operasi</b>					
Belanja Pegawai	B.3	3.715.812.000,00	3.699.012.238,00	<b>99,55</b>	3.246.149.204,00
Belanja Barang	B.4	26.406.401.000,00	25.342.851.262,00	<b>95,97</b>	24.498.211.583,00
Belanja Modal	B.5	1.487.810.000,00	1.479.657.290,00	<b>99,45</b>	517.834.401,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>31.610.023.000,00</b>	<b>30.521.520.790,00</b>	<b>96,56</b>	<b>28.262.195.188,00</b>

## II. NERACA

Laporan Keuangan Setwantimpres Tahun 2021 *Audited*

### SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN NERACA PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.2	1.227.918,00	44.000,00
Persediaan	C.3	779.416.150,00	1.191.423.739,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>780.644.068,00</b>	<b>1.191.467.739,00</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Peralatan dan Mesin	C.4	14.402.423.024,00	12.922.765.734,00
Aset Tetap Lainnya	C.5	1.900.000,00	1.900.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.6	(12.536.542.968,00)	(12.066.841.497,00)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>1.867.780.056,00</b>	<b>857.824.237,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.7	864.103.900,00	864.103.900,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.8	(740.230.150,00)	(690.680.650,00)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>123.873.750,00</b>	<b>173.423.250,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>2.772.297.874,00</b>	<b>2.222.715.226,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.9	7.176.049,00	7.282.436,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>7.176.049,00</b>	<b>7.282.436,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>7.176.049,00</b>	<b>7.282.436,00</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.10	2.765.121.825,00	2.215.432.790,00
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>2.765.121.825,00</b>	<b>2.215.432.790,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>2.772.297.874,00</b>	<b>2.222.715.226,00</b>

# III. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Keuangan Setwantimpres Tahun 2021 *Audited*

## SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	-
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	3.699.012.238,00	3.246.149.204,00
Beban Persediaan	D.3	1.332.635.485,00	1.011.289.842,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	20.495.436.541,00	19.934.492.600,00
Beban Pemeliharaan	D.5	2.515.761.168,00	2.480.051.795,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.408.642.352,00	636.067.099,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	519.250.971,00	427.128.901,00
Beban Lain-lain			
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>29.970.738.755,00</b>	<b>27.735.179.441,00</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(29.970.738.755,00)</b>	<b>(27.735.179.441,00)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.8		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		460.022,00	47.345.125,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	11.233.030,00
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		460.022,00	36.112.095,00
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>	D.9	<b>460.022,00</b>	<b>36.112.095,00</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(29.970.278.733,00)</b>	<b>(27.699.067.346,00)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(29.970.278.733,00)</b>	<b>(27.699.067.346,00)</b>

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Keuangan Setwantimpres Tahun 2021 *Audited*

### SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	TAHUN 2021	TAHUN 2020
EKUITAS AWAL	E.1	2.215.432.790,00	1.655.193.198,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(29.970.278.733,00)	(27.699.067.346,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHANKEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR			
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3.	(1.093.000,00)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN			
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI		(1.093.000,00)	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP			
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI			
KOREKSI LAIN-LAIN			
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	30.521.060.768,00	28.259.306.938,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	549.689.035,00	560.239.592,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.6	<b>2.765.121.825,00</b>	<b>2.215.432.790,00</b>

*Dasar  
Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2007, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden merupakan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Negara yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan Presiden dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara.

Berkedudukan di Jalan Veteran III No.2 Jakarta, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden.

Visi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden adalah "Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam mewujudkan Indonesia Maju dan Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan penyajian informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;
2. Memberikan dukungan pelayanan ketatausahaan, perencanaan

program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden secara prima.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi, ditetapkan tujuan strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagai berikut:

“Tercapainya tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden”.

**Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan**

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2021 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Aplikasi SAKTI merupakan aplikasi yang membantu SAI dalam menyusun laporan keuangan. Pada Aplikasi SAKTI, sistem sudah terintegrasi antar modul mulai dari dengan adanya jurnal di beberapa titik pengakuan jurnal secara akrual.

Modul-modul dalam SAKTI terdiri dari Modul Penganggaran (Komitmen, Bendahara dan Pembayaran) dan Modul Pelaporan (Aset Tetap, Persediaan dan *General Ledger* dan Pelaporan). Laporan Keuangan yang dihasilkan meliputi LRA, Neraca, LO dan LPE.

**Basis  
Akuntansi**

## **A.3. Basis Akuntansi**

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau

dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

**Dasar  
Pengukuran**

**A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

**Kebijakan  
Akuntansi**

**A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 *Audited* telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sekretariat Negara yang merupakan entitas pelaporan dari Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan

Presiden adalah sebagai berikut:

**Pendapatan-  
LRA**

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KasUmum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**Pendapatan-  
LO**

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**Belanja**

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban

atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**Beban**

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**Aset**

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

**Aset Lancar**

**Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi jangka pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bias diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca padanilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### **Aset Tetap**

#### **Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### **Aset Lainnya**

#### **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau

digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

#### **Kewajiban**

### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### a) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

#### b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### **Ekuitas**

### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

### **(8) Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### **Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap**

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Anggaran*  
*Rp31.610.023.000,00*

## **B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden melaksanakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya penghematan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Penghematan anggaran yang telah dilaksanakan selama T.A. 2021 sebanyak tiga kali, yaitu penghematan pada revisi DIPA pertama sebesar **Rp66.522.000,00**, revisi DIPA ke-3 sebesar **Rp186.753.000,00**, revisi DIPA ke-4 sebesar **Rp2.068.879.000,00** sehingga anggaran setelah revisi menjadi **Rp31.610.023.000,00**, dari anggaran awal sebesar **Rp33.932.177.000,00**.

Uraian	TA 2021	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>		
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	3.833.267.000,00	3.715.812.000,00
Belanja Barang	29.488.742.000,00	26.406.401.000,00
Belanja Modal	610.168.000,00	1.487.810.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>33.932.177.000,00</b>	<b>31.610.023.000,00</b>

*Realisasi*  
*Pendapatan*  
*Rp460.022,00*

### **B.1. Pendapatan**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp460.022,00. Pendapatan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, berupa Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	460.022,00	-
<b>Jumlah</b>	-	<b>460.022,00</b>	-

### Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Negara Bukan Pajak	460.022,00	2.888.250,00	(0,84)
<b>Jumlah</b>	<b>460.022,00</b>	<b>2.888.250,00</b>	<b>(0,84)</b>

Penerimaan Negara Bukan Pajak Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mengalami penurunan sebesar 84% yang berasal dari pendapatan pengembalian belanja barang tahun anggaran yang lalu.

**Realisasi Belanja  
Negara**  
Rp30.521.520.790,00

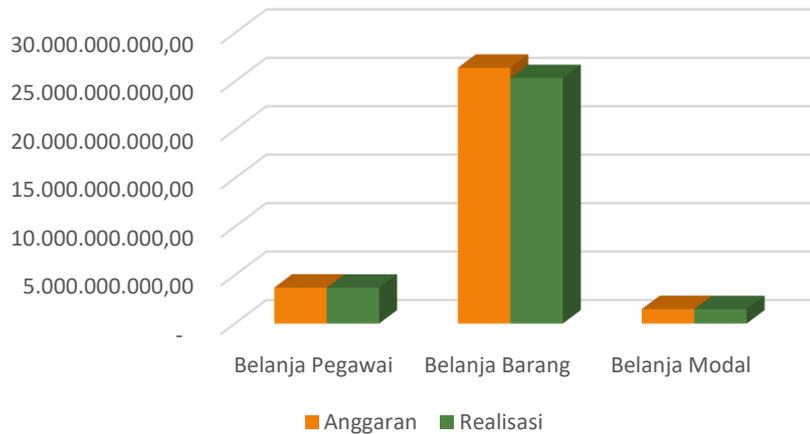
### B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2021 adalah sebesar Rp30.521.520.790,00 atau 96,56% dari anggaran belanja sebesar Rp31.610.023.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

### Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2021

Uraian	TA 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3.715.812.000,00	3.699.012.238,00	99,55
Belanja Barang	26.406.401.000,00	25.505.397.603,00	96,59
Belanja Modal	1.487.810.000,00	1.479.657.290,00	99,45
<b>Total Belanja Kotor</b>	-	<b>30.684.067.131,00</b>	
Pengembalian Belanja	-	162.546.341,00	
<b>Jumlah</b>	<b>31.610.023.000,00</b>	<b>30.521.520.790,00</b>	<b>96,56</b>

## Grafik Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2021



Dibandingkan dengan TA 2020, realisasi belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 7,99% karena pada tahun 2021 terdapat peningkatan volume kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan kegiatan operasional Sekretariat.

### Perbandingan Realisasi Belanja TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3.699.012.238	3.246.149.204	13,95
Belanja Barang	25.342.851.262	24.498.211.583	3,45
Belanja Modal	1.479.657.290	517.834.401	185,74
<b>Jumlah</b>	<b>30.521.520.790,00</b>	<b>28.262.195.188,00</b>	<b>7,99</b>

**Belanja Pegawai**  
Rp3.699.012.238,00

### B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.699.012.238,00 dan Rp3.246.149.204,00. Realisasi belanja pegawai TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 13,95% dari TA 2020 karena pada tahun 2021 terdapat pembayaran atas gaji ke 13 dan gaji ke 14 untuk pejabat negara dan pejabat eselon 1.

### Perbandingan Belanja Pegawai TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	3.172.869.238,00	2.684.602.204,00	18,19
Belanja Lembur	97.000,00	19.983.000,00	(99,51)
Belanja Uang Makan PNS	526.046.000,00	541.564.000,00	(2,87)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>3.699.012.238,00</b>	<b>3.246.149.204,00</b>	<b>13,95</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.699.012.238,00</b>	<b>3.246.149.204,00</b>	<b>13,95</b>

*Belanja Barang*  
*Rp25.342.851.262,00*

### B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp25.342.851.262,00 dan Rp24.498.211.583,00. Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,45% dari Realisasi Belanja Barang TA 2020 karena pada tahun 2021 terdapat peningkatan volume kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden terutama pada kegiatan perjalanan dinas dalam negeri.

### Perbandingan Belanja Barang TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	16.481.184.225,00	16.744.286.047,00	(1,57)
Belanja Barang Non Operasional	651.365.587,00	387.383.706,00	68,14
Belanja Persediaan	1.125.847.465,00	1.541.043.540,00	(26,94)
Belanja Jasa	3.526.723.375,00	3.411.618.435,00	3,37
Belanja Pemeliharaan	2.311.634.599,00	2.403.104.145,00	(3,81)
Belanja Perjalanan	1.408.642.352,00	636.067.099,00	121,46
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>25.505.397.603,00</b>	<b>25.123.502.972,00</b>	<b>1,52</b>
Pengembalian Belanja	162.546.341	625.291.389,00	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>25.342.851.262,00</b>	<b>24.498.211.583,00</b>	<b>3,45</b>

**Belanja Modal**  
**Peralatan dan Mesin**  
*Rp1.479.657.290,00*

### B.5. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.479.657.290,00 dan Rp517.834.401,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 185,74% dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020.

Kenaikan Realisasi Belanja Barang TA 2021 antara lain dikarenakan adanya peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor serta peningkatan kebutuhan penanganan pandemi Covid-19.

#### Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Komputer Unit	399.675.300,00	26.586.000,00	1.403,33
Alat Angkutan	-	59.287.400,00	-
Alat Kedokteran	102.300.000,00	7.597.000,00	1.246,58
Alat Bengkel dan Alat Ukur	11.315.000,00	-	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	845.776.500,00	156.166.000,00	441,59
Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	120.590.490,00	70.000.001,00	72,27
Sot ware	-	198.198.000,00	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.479.657.290,00</b>	<b>517.834.401,00</b>	<b>185,74</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.479.657.290,00</b>	<b>517.834.401,00</b>	<b>185,74</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp 0,00*

### C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

#### Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

URAIAN	Kas Per 31 Des 2021	Kas Per 31 Des 2020
Kas Tunai	-	-
Kas Bank	-	-
Selisih kas	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Belanja Dibayar di  
Muka  
Rp1.227.918,00*

### C.2. Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka adalah pengeluaran Satker yang telah dibayarkan dari rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggaran namun barang/jasa belum diterima/dinikmati Satker.

Belanja dibayar di muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.227.918,00 dan Rp44.000,00.

#### Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

JENIS	TAHUN 2021	TAHUN 2020
Belanja dibayar di muka	1.227.918,00	44.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.227.918,00</b>	<b>44.000,00</b>

Belanja di bayar dimuka Tahun 2021 merupakan belanja langganan Zoom Meeting selama satu tahun, yang telah dibayarkan pada April 2021 dan akan berakhir pada Maret 2022.

**Persediaan**  
Rp779.416.150,00

### C.3. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp779.416.150,00 dan Rp1.191.423.739,00. Persediaan merupakan jenis asset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Persediaan	TA 2021	TA 2020
Barang Konsumsi	466.404.795,00	745.046.760
Bahan untuk Pemeliharaan	171.778.305,00	312.354.774
Bahan Baku	108.350.350,00	92.923.955
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	30.346.350,00	36.368.300
Persediaan Lainnya	2.536.350,00	4.729.950
<b>Jumlah</b>	<b>779.416.150,00</b>	<b>1.191.423.739</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

**Peralatan dan Mesin**  
Rp14.402.423.024,00

### C.4. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp14.402.423.024,00 dan Rp12.922.765.734,00 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>12.922.765.734,00</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	1.479.657.290,00
Mutasi kurang:	
Usulan Barang Rusak ke Pengelola	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>14.402.423.024,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(12.536.542.968,00)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>1.865.880.056,00</b>

Transaksi mutasi penambahan peralatan dan mesin senilai Rp1.479.657.290,00 berupa:

a. Komputer senilai Rp399.675.300,00

Nama Barang	Jumlah
External/Portable Hardisk	4 unit
Hard Disk	4 unit
Komputer Unit Lainnya	1 unit
Note Book	12 unit
P.C Unit	4 unit

b. Alat Kedokteran dan Kesehatan, senilai Rp102.300.000,00

Nama Barang	Jumlah
Mesin GeNose C19	2 unit
Termometer	1 unit

c. Alat Bengkel dan Alat Ukur, senilai Rp11.315.000,00

Nama Barang	Jumlah
<i>car washer</i>	1 unit

d. Alat kantor dan rumah tangga senilai, Rp845.776.500,00

Nama Barang	Jumlah
A.C. Split	9 unit
Alat Rumah Tangga Lainnya	1 unit
CCTV - Camera Control Television System	21 unit
Kursi Besi/Metal	44 unit
Kursi Kayu	10 unit
Lambang Garuda Pancasila	2 unit
<i>Loudspeaker</i>	1 unit
Meja Kerja Besi/Metal	24 unit
Meubelair lainnya	14 unit
Televisi	7 unit

e. Alat Studio Komunikasi dan Pemancar

Nama Barang	Jumlah
Peralatan Studio Video dan Film Lainnya	1 unit
Camera Digital	1 unit
Lampu Blitz Kamera	1 unit
Clipp On	1 unit
Tripod Camera	1 unit
Handy Talky (HT)	7 unit
Camera Conference	2 unit

**Aset Tetap  
Lainnya**  
Rp1.900.000,00

**C.5. Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp1.900.000,00 dan Rp1.900.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2021 tidak terdapat mutasi tambah atau pun kurang atas Aset Tetap Lainnya.

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>1.900.000,00</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Transfer keluar	0
<b>Saldo per 30 Juni 2021</b>	<b>1.900.000,00</b>

**Akumulasi Penyusutan  
Aset Tetap**  
Rp(12.536.542.96800)

**C.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp(12.536.542.968,00) dan Rp(12.066.841.497,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	14.402.423.024,00	(12.536.542.968,00)	1.865.880.056,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		14.402.423.024,00	(12.536.542.968,00)	1.865.880.056,00

**Aset Tak Berwujud**  
Rp864.103.900,00

### C.7. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp864.103.900,00 dan Rp864.103.900,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak terdapat mutasi terhadap Aset Tak Berwujud (ATB) selama periode TA 2021.

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>864.103.900,00</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Mutasi kurang:	
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>864.103.900,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(740.230.150,00)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>123.873.750,00</b>

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

### Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
<i>Software</i>	864.103.900,00
<b>Jumlah</b>	<b>864.103.900,00</b>

**Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya**  
Rp(740.230.150,00)

### C.8. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp(740.230.150,00) dan Rp(690.680.650,00). Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya merupakan alokasi sistematis

atas nilai suatu aset lainnya yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Rincian akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

**Rincian Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya**

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Software	864.103.900,00	(740.230.150,00)	123.873.750,00
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>864.103.900,00</b>	<b>(740.230.150,00)</b>	<b>123.873.750,00</b>

*Utang Kepada Pihak Ketiga Rp7.176.049,00*

**C.9. Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp7.176.049,00 dan Rp7.282.436,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian nilai utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

**Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	T.A. 2021	T.A. 2020
<b>Belanja Keperluan Perkantoran</b>	<b>7.176.049,00</b>	<b>7.282.436,00</b>
Belanja Langganan Telepon dan TV Kabel	7.176.049,00	7.282.436,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.176.049,00</b>	<b>7.282.436,00</b>

Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2021 adalah Belanja Langganan Telepon dan TV Kabel untuk pemakaian bulan Desember 2021, masing-masing sebesar Rp2.539.549,00 dan Rp4.636.500,00.

*Ekuitas Rp2.765.121.825,00*

**C.10. Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.765.121.825,00 dan Rp2.215.432.790,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan Rp0,00*

### D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Tidak terdapat pendapatan penerimaan bukan pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

*Beban Pegawai  
Rp3.699.012.238,00*

### D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.699.012.238,00 dan Rp3.246.149.204,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

#### Rincian Beban Pegawai TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	3.172.869.238,00	2.684.602.204,00	18,19
Beban Lembur	97.000,00	19.983.000,00	(99,51)
Beban Uang Makan PNS	526.046.000,00	541.564.000,00	(2,87)
<b>Jumlah</b>	<b>3.699.012.238,00</b>	<b>3.246.149.204,00</b>	<b>13,95</b>

*Beban Persediaan  
Rp1.332.635.485,00*

### D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.332.635.485,00 dan Rp1.011.289.842,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

**Rincian Beban Persediaan  
TA 2021 dan TA 2020**

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan konsumsi	1.263.308.830,00	677.055.217,00	86,59
Beban Persediaan bahan baku	47.753.605,00	303.368.255,00	(84,26)
Beban persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	19.379.450,00	28.517.620,00	(32,04)
Beban persediaan lainnya	2.193.600,00	2.348.750,00	(6,61)
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>1.332.635.485,00</b>	<b>1.011.289.842,00</b>	<b>31,78</b>

*Belanja Barang dan  
Jasa  
Rp20.495.436.541,00*

**D.4. Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp20.495.436.541,00 dan Rp19.934.492.600,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang dan Jasa  
Tahun 2021 dan TA 2020**

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	4.350.344.433,00	3.919.599.597,00	10,99
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	473.000,00	1.821.094,00	(74,03)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	188.114.000,00	300.680.000,00	(37,44)
Beban Barang Operasional Lainnya	11.788.346.874,00	12.445.580.000,00	(5,28)
Beban Bahan	166.335.587,00	128.473.706,00	29,47
Beban Honor Output Kegiatan	331.830.000,00	204.510.000,00	62,26
Beban Langganan Telepon	38.435.588,00	32.790.424,00	17,22
Beban Sewa	2.903.389.962,00	2.815.939.312,00	3,11
Beban Jasa Profesi	354.350.000,00	175.950.000,00	101,39
Beban Barang Non Operasional penanganan Pandemi Covid 19	152.705.000,00	52.400.000,00	191,42
Beban Barang Operasional penanganan Pandemi Covid 19	153.200.000,00	78.544.856,00	95,05
Beban Jasa Penanganan Pandemi Covid-19	230.458.438,00	374.664.000,00	(38,49)
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	-	28.831.000,00	(100,00)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>20.657.982.882,00</b>	<b>20.559.783.989,00</b>	<b>0,48</b>
Pengembalian Belanja	(162.546.341,00)	(625.291.389,00)	(74,00)
<b>Jumlah</b>	<b>20.495.436.541,00</b>	<b>19.934.492.600,00</b>	<b>2,81</b>

**Beban Pemeliharaan**  
Rp2.515.761.168,00

#### D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.515.761.168,00 dan Rp2.480.051.795,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

##### Rincian Beban Pemeliharaan TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.961.463.767,00	2.081.717.430,00	(5,78)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	151.574.832,00	134.790.715,00	12,45
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	204.126.569,00	64.947.650,00	214,29
Beban Pemeliharaan Lainnya	198.596.000,00	198.596.000,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.515.761.168,00</b>	<b>2.480.051.795,00</b>	<b>1,44</b>

**Beban Perjalanan Dinas**  
Rp1.408.642.352,00

#### D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.408.642.352,00 dan Rp636.067.099,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

##### Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	992.380.712,00	354.290.955,00	180,10
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.700.000,00	12.150.000,00	45,68
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	51.355.000,00	7.351.127,00	598,60
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	347.206.640,00	104.839.573,00	231,18
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0,00	157.435.444,00	(100,00)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.408.642.352,00</b>	<b>636.067.099,00</b>	<b>121,46</b>
Pengebalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.408.642.352,00</b>	<b>636.067.099,00</b>	<b>121,46</b>

**Beban Penyusutan dan Amortisasi**  
Rp519.250.971,00

### D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp519.250.971,00 dan Rp427.128.901,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2021 dan TA 2020

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TAHUN 2021	TAHUN 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	469.701.471,00	402.354.151,00	16,74
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>469.701.471,00</b>	<b>402.354.151,00</b>	<b>16,74</b>
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	49.549.500,00	24.774.750,00	100,00
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>49.549.500,00</b>	<b>24.774.750,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>519.250.971,00</b>	<b>427.128.901,00</b>	<b>21,57</b>

**Surplus dari Kegiatan Non Operasional**  
Rp460.022,00

### D.8. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	460.022,00	47.345.125,00	(99,03)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	460.022,00	2.888.250,00	
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	44.456.875,00	
Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya	-	11.233.030,00	(100,00)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	11.233.030,00	
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>460.022,00</b>	<b>58.578.155,00</b>	<b>(99,21)</b>

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**Ekuitas Awal**  
Rp2.215.432.790,00

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.215.432.790,00 dan Rp1.655.193.198,00.

**Defisit LO**  
Rp(29.970.278.733,00)

### E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(29.970.278.733,00) dan Rp (27.699.067.346,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

**Penyesuaian Nilai Aset**  
Rp(1.093.000.00)

### E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp(1.093.000.00) dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

**Transaksi Antar Entitas**  
Rp30.521.060.768,00

### E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp30.521.060.768.00 dan Rp28.259.306.938,00 Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

#### Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas TA 2021

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(460.022)
Ditagihkan ke Entitas Lain	30.521.520.790
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>30.521.060.768</b>

*Penurunan Ekuitas*  
*Rp549.689.035,00*

### **E.5. Kenaikan / Penurunan Ekuitas**

Penurunan Ekuitas Tahun 2021 sebesar Rp549.689.035,00

*Ekuitas Akhir*  
*Rp2.765.121.825,00*

### **E.6. Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas Akhir tanggal Tahun 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.765.121.825.00 dan Rp2.215.432.790,00

## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1. Pagu Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden TA 2021 sebesar Rp898.371.000,00, dengan rincian alokasi sebagai berikut,

Akun	Uraian	Anggaran
521131	Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	152.705.000,00
521241	Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	237.780.000,00
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	153.760.000,00
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	251.826.000,00
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Penanganan Pandemi COVID-19	102.300.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>898.371.000,00</b>

### F.2. Realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19

Realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada TA 2021 adalah sebesar Rp876.402.418,00 atau 97,55% dari anggaran belanja sebesar Rp898.371.000,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 TA 2021 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 TA 2021

Uraian	TA 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	152.705.000,00	152.705.000,00	100,00
Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	153.760.000,00	153.200.000,00	99,64
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	237.780.000,00	237.738.980,00	99,98
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	251.826.000,00	230.458.438,00	91,51
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Penanganan Pandemi COVID-19	102.300.000,00	102.300.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>898.371.000,00</b>	<b>876.402.418,00</b>	<b>97,55</b>

### F.3 Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19

Realisasi Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19 T.A. 2021 adalah sebesar Rp152.705.000,00, atau 100% dari anggaran belanja sebesar Rp152.705.000,00. Rincian realisasi Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid-19 TA 2021 adalah sebagai berikut:

#### Realisasi Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19 per 31 Desember 2021

Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	Per 31 Desember 2021
Pengadaan Vitamin untuk Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden bulan Maret 2021	15.270.500,00
Pengadaan Vitamin untuk Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden bulan April 2021	15.270.500,00
Pengadaan Vitamin untuk Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden bulan Mei 2021	15.270.500,00
Pengadaan Vitamin untuk Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden bulan Juni 2021	15.270.500,00
Pengadaan Vitamin untuk Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden bulan Juli 2021	15.270.500,00
Pengadaan Vitamin untuk Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden bulan Agustus dan September 2021	30.541.000,00
Pengadaan Vitamin untuk Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden bulan Oktober 2021	15.270.500,00
Pengadaan Vitamin untuk Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden bulan November 2021	15.270.500,00
Pengadaan Vitamin untuk Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden bulan Desember 2021	15.270.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>152.705.000,00</b>

### F.4 Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19

Realisasi Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19 T.A. 2021 adalah sebesar Rp153.200.000,00, atau 99,64% dari anggaran belanja sebesar Rp153.760.000,00. Rincian realisasi Belanja Barang Non Operasional Penanganan Pandemi Covid-19 TA 2021 adalah sebagai berikut:

**Realisasi Belanja Barang Non Operasional –  
Penanganan Pandemi COVID-19 per 31 Desember 2021**

<b>Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19</b>	<b>Per 31 Desember 2021</b>
<b>Belanja Barang Paket Data dan Komunikasi pejabat dan pegawai</b>	<b>127.400.000,00</b>
<b>Biaya paket data dan komunikasi pada Biro Data dan Informasi bulan November 2021</b>	<b>5.400.000,00</b>
<b>Biaya paket data dan komunikasi pada Biro Data dan Informasi bulan Desember 2021</b>	<b>5.400.000,00</b>
<b>Biaya paket data dan komunikasi pada Biro Umum Setwantimpres bulan November 2021</b>	<b>7.200.000,00</b>
<b>Biaya paket data dan komunikasi pada Biro Umum Setwantimpres bulan Desember 2021</b>	<b>7.600.000,00</b>
<b>Biaya paket data dan komunikasi pada Biro Umum Setwantimpres bulan Juni 2021 a/n Lestina S.</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>153.200.000,00</b>

**F.5 Belanja Persediaan – Penanganan Pandemi COVID-19**

Realisasi Belanja Persediaan – Penanganan Pandemi COVID-19 T.A. 2021 adalah sebesar Rp237.738.980,00., atau 99,98% dari anggaran belanja sebesar Rp237.780.000,00. Rincian realisasi Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi Covid-19 TA 2021 adalah sebagai berikut:

**Realisasi Belanja Persediaan –  
Penanganan Pandemi COVID-19 per 31 Desember 2021**

<b>Belanja Barang Persediaan- Penanganan Pandemi Covid-19</b>	<b>Per 31 Desember 2021</b>
Belanja barang Pengadaan Hand Sanitizer dan Disinfektan Tahun 2021 Termin I	10.480.000,00
Belanja barang pengadaan masker medis Termin I	9.570.000,00
Belanja barang pengadaan masker medis Termin II	9.570.000,00
Belanja barang Pengadaan Hand Sanitizer dan Disinfektan Tahun 2021 Termin II	10.480.000,00
Pengadaan Kantong Plastik GeNose dan HEPA Filter GeNose	7.755.000,00
belanja barang Pengadaan Hand Sanitizer dan Disinfektan Tahun 2021 Termin III	10.480.000,00
belanja barang pengadaan masker medis Tahun 2021 Termin III	9.570.000,00
Belanja barang pengadaan masker medis Termin IV	9.570.000,00
belanja barang Pengadaan Hand Sanitizer dan Disinfektan Tahun 2021 Termin IV	10.480.000,00
Pengadaan kantong plastik GeNose dan HEPA Filter	16.163.480,00
Belanja barang pengadaan masker medis Termin V	9.570.000,00
belanja barang Pengadaan Hand Sanitizer dan Disinfektan Tahun 2021 Termin V	10.480.000,00
Belanja barang pengadaan masker medis Termin VI	9.570.000,00
belanja barang Pengadaan Hand Sanitizer dan Disinfektan Tahun 2021 Termin VI	10.480.000,00
Belanja barang pengadaan masker medis Termin VII	9.570.000,00
Belanja Barang Pengadaan Plastik Genos	11.000.000,00
Belanja Barang Pengadaan Plastik Genos	33.770.000,00
Belanja barang pengadaan masker medis Termin VIII	9.570.000,00
Belanja barang pengadaan masker medis Termin IX	9.570.000,00
Belanja Barang Pengadaan Sarung Tangan Latex isi 100 sebanyak 10 Dus	3.100.500,00
Belanja barang pengadaan masker medis Termin X	9.570.000,00
Belanja Barang Pengadaan Plastik Genos	7.370.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>237.738.980,00</b>

## F.6 Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19

Realisasi Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19 T.A. 2021 adalah sebesar Rp230.458.438,00. atau 100% dari anggaran belanja sebesar Rp251.826.000,00. Rincian realisasi Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid-19 TA 2021 adalah sebagai berikut:

### Realisasi Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19 per 31 Desember 2021

Belanja Jasa- Penanganan Pandemi Covid-19	Per 31 Desember 2021
Penyemprotan disinfektan bulan Januari dan Februari	74.007.538,00
Penyemprotan disinfektan Termin I	8.000.000,00
Penyemprotan disinfektan Termin II	8.000.000,00
Penyemprotan disinfektan Termin III	8.000.000,00
Tes Antigen untuk Pejabat dan Pegawai Setwantimpres pada tgl 17 Februari 2021 s.d 25 Maret 2021	5.750.000,00
Tes Antigen dan PCR SARS-CoV-2 untuk Pejabat dan Pegawai Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden pada tanggal 1, 12 dan 15 April 2021	3.450.000,00
Penyemprotan disinfektan Termin IV	8.000.000,00
Tes Antigen untuk Pejabat dan Pegawai Setwantimpres pada tgl 18 s.d 24 Mei 2021	3.250.000,00
Penyemprotan disinfektan Termin V	8.000.000,00
Tes Antigen untuk Pejabat dan Pegawai Setwantimpres pada tgl 20 Mei 2021	1.000.000,00
Tes Antigen untuk Pejabat dan Pegawai Setwantimpres pada tgl 28 Juni 2021	1.300.000,00
Penyemprotan disinfektan Termin VI	8.000.000,00
Tes Antigen dan PCR untuk Pejabat dan Pegawai Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden serta penyemprotan disinfektan	31.290.700,00
Penyemprotan disinfektan Termin VII	8.000.000,00
Penyemprotan disinfektan Termin VIII	8.000.000,00
Tes Antigen untuk Pejabat dan Pegawai Setwantimpres pada tgl 26 s.d 30 Sept 2021	7.688.000,00
Penyemprotan disinfektan Termin IX	8.000.000,00
Tes Antigen untuk Pejabat dan Pegawai Setwantimpres pada tgl 3 Oktober s.d 18 November 2021	15.612.200,00
Penyemprotan disinfektan Termin X	8.000.000,00
Biaya pemeriksaan test Rapid Swab Antigen dalam rangka perjalanan dinas ke Yogyakarta tanggal 5-7 November 2021 an. Sugeng Widodo	99.000,00
Tes Antigen dan PCR untuk Pegawai Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tanggal 04 s/d 22 November 2021	3.025.000,00
Biaya pemeriksaan test Rapid Swab Antigen dalam rangka perjalanan dinas ke Jepara Jawa Tengah tanggal 29 November s/d 01 Desember 2021	183.000,00
Penggantian swap antigen narasumber pertemuan terbatas Anggota Wantimpres Bp.Arifin Panigoro tanggal 21 Desember 2021	784.000,00
Tes Antigen dan PCR untuk Pegawai Set. Wantimpres periode tanggal 08 s/d 20 Desember 2021	1.837.000,00
Tes Antigen dan PCR untuk Pegawai Set. Wantimpres dan Narasumber tanggal 21 Desember 2021	425.000,00
Biaya pemeriksaan test Rapid Swab Antigen dalam rangka perjalanan dinas ke Lampung tanggal 20-24 Desember 2021 an. M. Faried, dkk (4 orang)	316.000,00
Test Swab Antigen untuk Pegawai Set. DPP a.n. Rasya Ramdhanisa sesuai dengan kwitansi tanggal 30 Desember 2021	45.000,00
Tes Swab Antigen untuk Pegawai Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden periode tanggal 30 Desember 2021	396.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>230.458.438,00</b>

## **F.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi COVID-19**

Realisasi Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi COVID-19 T.A. 2021 adalah sebesar Rp102.300.000,00, atau 100% dari anggaran belanja sebesar Rp102.300.000,00. Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Penanganan Pandemi Covid-19 TA 2021 adalah sebagai berikut:

### **Realisasi Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi COVID-19 per 31 Desember 2021**

<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid-19</b>	<b>Per 31 Desember 2021</b>
Pengadaan Face Thermal (Termometer Face Recognition) DHI-ASI7213X-T with custom bracket sebanyak 1 unit	34.100.000,00
Pengadaan Mesin GeNose	68.200.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>102.300.000,00</b>

## **F.8 Rekening Pemerintah**

Bagian Anggaran 007.07 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dikelola melalui rekening bank atas nama BPG 018 Dewan Pertimbangan Presiden pada BNI Cabang Harmoni KK Setneg dengan nomor rekening 9894565005921000.

Dana Operasional Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020 dikelola melalui rekening bank atas nama BPP 018 Dewan Pertimbangan Presiden pada BNI Cabang Harmoni KK Setneg dengan nomor rekening 9894565005921001.

## **F.9 Pengungkapan Lainnya**

Berdasarkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 199 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dan Keputusan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penghentian dan Pengangkatan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Keputusan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan:

Kuasa Pengguna Anggaran : Agus Widodo

Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan : Bintang Verawaty

Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengelolaan Dana Operasional Menteri : Toto Suroto

Pejabat Penandatangan SPM : Uup Supendi

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB)  
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN  
TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2021 AUDITED**

**I. PENDAHULUAN**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 2011;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.06/2016 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
- r. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- s. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
- t. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara;

- u. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KMK.06/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- v. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- w. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KMK.6/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- x. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.6/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- y. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-1/KN/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- z. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan.

## 2. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dengan Kode Bagian Anggaran 007.07.00.500592.

## 3. Periode Pelaporan

Periode Pelaporan BMN Tingkat UAKPB Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden periode Tahunan Tahun Anggaran (TA) 2021 *Audited* adalah 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021.

## II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, antara lain meliputi:

1. Penggolongan/klasifikasi BMN berupa Aset Tetap di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KMK.6/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, sedangkan atas Barang Persediaan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 40/PB/2006 tentang Barang Persediaan;
2. Pelaksanaan kapitalisasi/pengembangan nilai BMN di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dilakukan dengan mengacu pada ketentuan bahwa terhadap Aset Tetap berupa gedung dan bangunan nilai kapitalisasinya Rp25.000.000 ke atas, sedangkan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin memiliki nilai kapitalisasi Rp1.000.000 ke atas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
3. Rekonsiliasi dan Konsolidasi data Laporan BMN di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dilakukan secara periodik dan berjenjang kepada unit akuntansi atas. Selain itu, rekonsiliasi juga dilakukan antara unit akuntansi barang bersama dengan unit akuntansi keuangan, serta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, guna menjaga keakuratan dan keandalan Laporan BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

4. Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah melakukan penyusutan BMN berupa Aset Tetap di Semester I dan Semester II Tahun Anggaran 2014 yang berubah dari basis akuntansi kas menjadi basis akuntansi kas menuju akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

### III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Laporan BMN tingkat UAKPB Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden periode Tahunan TA 2021 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

Nilai BMN Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) yang disajikan pada Tahun Anggaran 2021 *Audited* ini adalah sebesar Rp14.486.435.590 (empat belas milyar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) angka tersebut terdiri dari nilai mutasi tambah BMN yang terjadi selama Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.480.750.290 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah). Nilai mutasi tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan. Laporan BMN tingkat UAKPB Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun Anggaran 2021 merupakan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) pada Biro Umum Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

**Commented [R1]:** Laporan Gab Intra Ekstra Total dari Peralatan Mesin dan aset tetap lainnya

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Aplikasi SAKTI pada Kementerian Sekretariat Negara;
14. Laporan PNPB yang terkait dengan Pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

### IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PERIODE TAHUN ANGGARAN 2021 AUDITED

#### 1. Saldo Awal Periode Tahun Anggaran 2021 *Audited*

Nilai BMN per 01 Januari 2021 menurut Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden adalah sebesar Rp13.005.685.300 (tiga belas milyar lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dari nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp12.924.665.734 (dua belas milyar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) dan nilai ekstrakomptabel sebesar Rp81.019.566 (delapan puluh satu juta

sembilan belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

**Commented [R2]:** Saldo Akhir BMN Gabungan Awal Tahun

## 2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Periode Tahun Anggaran 2021 Audited

Mutasi BMN periode Tahun Anggaran 2021 Audited adalah sebagai berikut:

### a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan BMN tingkat UAKPB Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden per 31 Desember 2021 sebesar Rp779.416.150 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu seratus lima puluh rupiah), jumlah tersebut terdiri dari Saldo Awal sebesar Rp1.191.423.739 (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan total mutasi persediaan selama periode laporan berkurang sebesar Rp412.007.589 (empat ratus dua belas juta tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Kode	Uraian	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
117111	Barang Konsumsi	745.046.760	(278.641.965)	466.404.795
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	312.354.774	(140.576.469)	171.778.305
117114	Suku Cadang	0	0	0
117131	Bahan Baku	92.923.955	15.426.395	108.350.350
117191	Persediaan untuk tujuan	36.368.300	(6.021.950)	30.346.350
117199	Persediaan Lainnya	4.729.950	(2.193.600)	2.536.350
<b>JUMLAH</b>		<b>1.191.423.739</b>	<b>(412.007.589)</b>	<b>779.416.150</b>

Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tidak memiliki barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang.

### b. Tanah (131111)

Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tidak memiliki Aset berupa Tanah.

### c. Peralatan dan Mesin (132111)

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021	2.324	unit dengan nilai sebesar	Rp	14.402.423.024
Terdiri dari Saldo Awal sebanyak	2.148	unit dengan nilai sebesar	Rp	12.922.765.734
Mutasi Tambah Per 31 Desember 2021	176	unit dengan nilai sebesar	Rp	1.479.657.290
Mutasi Kurang Per 31 Desember 2021	-	unit dengan nilai sebesar	Rp	-

**Commented [R3]:** Saldo Awal Intrakomptabel BMN Peralatan Mesin (Menurut Inspektorat dan Satker BMN Lain 2020)

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

#### 1) Alat Besar (3.01)

Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tidak memiliki Peralatan dan Mesin berupa Alat Besar.

#### 2) Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan per 31 Desember 2021	16	unit dengan nilai sebesar	Rp	479.275.513
Terdiri dari Saldo Awal sebanyak	16	unit dengan nilai sebesar	Rp	479.275.513
Mutasi Tambah Per 31 Desember 2021	-	unit dengan nilai sebesar	Rp	-
Mutasi Kurang Per 31 Desember 2021	-	unit dengan nilai sebesar	Rp	-

Penjelasan

- i. Pada Laporan BMN periode Tahun Anggaran 2021 *Audited* tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada Alat Angkutan.
- ii. Dari jumlah 16 unit Alat Angkutan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	16 unit	Rp 479.275.513
Rusak Ringan	- unit	Rp -
Rusak Berat	- unit	Rp -

**3) Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)**

Saldo Alat Bengkel & Ukur per 31 Desember 2021	11 unit dengan nilai sebesar	Rp 27.965.500
Terdiri dari Saldo Awal sebanyak	9 unit dengan nilai sebesar	Rp 16.650.500
Mutasi Tambah Per 31 Desember 2021	2 unit dengan nilai sebesar	Rp 11.315.000
Mutasi Kurang Per 31 Desember 2021	- unit dengan nilai sebesar	Rp -

Mutasi tambah tersebut meliputi:

Kode	Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
101	Pembelian	Rp 11.315.000	Rp -
<b>Jumlah Penambahan</b>		<b>Rp 11.315.000</b>	<b>Rp -</b>

Penjelasan

- i. Pada Laporan BMN periode Tahun Anggaran 2021 *Audited* terdapat mutasi tambah pada Alat Bengkel dan Alat Ukur berupa pembelian *Car Washer* sebanyak 1 unit dan Mesin Bor Tangan sebanyak 1 unit dengan total nilai sebesar Rp11.315.000.
- ii. Pada Laporan BMN periode Tahun Anggaran 2021 *Audited* tidak ada mutasi kurang pada Alat Bengkel dan Alat Ukur.
- iii. Dari jumlah 11 unit Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	11 unit	Rp 27.965.500
Rusak Ringan	- unit	Rp -
Rusak Berat	- unit	Rp -

**4) Alat Pertanian (3.04)**

Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tidak memiliki Peralatan dan Mesin berupa Alat Pertanian.

**5) Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)**

Saldo Alat Kantor & Rumah Tangga per 31 Desember 2021	1.784 unit dengan nilai sebesar	Rp 6.462.478.266
Terdiri dari Saldo Awal sebanyak	1.649 unit dengan nilai sebesar	Rp 5.616.301.766
Mutasi Tambah Per 31 Desember 2021	135 unit dengan nilai sebesar	Rp 846.176.500
Mutasi Kurang Per 31 Desember 2021	- unit dengan nilai sebesar	Rp -

Mutasi tambah tersebut meliputi:

Kode	Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
101	Pembelian	Rp 845.776.500	Rp -
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	Rp -	Rp 400.000
<b>Jumlah Penambahan</b>		<b>Rp 845.776.500</b>	<b>Rp 400.000</b>

Penjelasan

- Pada Laporan BMN periode Tahunan Anggaran 2021 *Audited* terdapat mutasi tambah pada Alat Kantor dan Rumah Tangga berupa pembelian A.C. Split sebanyak 9 unit, Alat Rumah Tangga Lainnya sebanyak 1 unit, CCTV - Camera Control Television System sebanyak 21 unit, Kursi Besi/Metal sebanyak 44 unit, Kursi Kayu sebanyak 10 unit, Lambang Garuda Pancasila sebanyak 2 unit, *Loudspeaker* sebanyak 1 unit, Meja Kerja Besi/Metal sebanyak 24 buah, Meubelair Lainnya sebanyak 14 unit dan Televisi sebanyak 7 unit dengan total nilai sebesar Rp845.776.500, serta reklasifikasi masuk dari persediaan berupa Gambar Presiden/Wakil Presiden sebanyak 2 unit dengan total nilai sebesar Rp400.000. Munculnya jenis transaksi reklasifikasi masuk dari persediaan terjadi karena pada saat pembelian Aset Ekstrakomptabel, akun 52 yang digunakan untuk belanja barang tersebut tidak bisa terdeteksi sebagai Aset Tetap oleh Aplikasi SAKTI, sehingga barang tersebut dicatat terlebih dahulu sebagai Barang Persediaan di Aplikasi SAKTI sebelum dilakukan reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel.
- Pada Laporan BMN periode Tahun Anggaran 2021 *Audited* tidak ada mutasi kurang pada Alat Kantor dan Rumah Tangga.
- Dari jumlah 1.784 unit Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1.784 unit	Rp 6.462.478.266
Rusak Ringan	- unit	Rp -
Rusak Berat	- unit	Rp -

**6) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)**

Saldo Alat Studio, Komunikasi per 31 Desember 2021	271 unit dengan nilai sebesar	Rp 824.123.335
Terdiri dari Saldo Awal sebanyak	256 unit dengan nilai sebesar	Rp 702.839.845
Mutasi Tambah Per 31 Desember 2021	15 unit dengan nilai sebesar	Rp 121.283.490
Mutasi Kurang Per 31 Desember 2021	- unit dengan nilai sebesar	Rp -

Mutasi tambah tersebut meliputi:

Kode	Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
101	Pembelian	Rp 120.590.490	Rp -
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	Rp -	Rp 693.000
<b>Jumlah Penambahan</b>		<b>Rp 120.590.490</b>	<b>Rp 693.000</b>

Penjelasan

- Pada Laporan BMN periode Tahun Anggaran 2021 *Audited* terdapat mutasi tambah pada Alat Studio Komunikasi dan Pemancar berupa pembelian Peralatan Studio Video dan Film Lainnya sebanyak 1 unit, *Camera Digital* sebanyak 1 unit, Lampu Blitz Kamera sebanyak 1 unit, *Clipp On* sebanyak 1 unit, *Tripod Camera* sebanyak 1 unit, *Handy Talky* (HT) sebanyak 7 unit, *Camera Conference* sebanyak

2 unit dengan total nilai sebesar Rp120.590.490, serta reklasifikasi masuk dari persediaan berupa *Head Set* sebanyak 1 unit dengan total nilai sebesar Rp693.000. Munculnya jenis transaksi reklasifikasi masuk dari persediaan terjadi karena pada saat pembelian Aset Ekstrakomtabel, akun 52 yang digunakan untuk belanja barang tersebut tidak bisa terdeteksi sebagai Aset Tetap oleh Aplikasi SAKTI, sehingga barang tersebut dicatat terlebih dahulu sebagai Barang Persediaan di Aplikasi SAKTI sebelum dilakukan reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel.

- ii. Pada Laporan BMN periode Tahun Anggaran 2021 *Audited* tidak ada mutasi kurang pada Alat Studio Komunikasi dan Pemancar.
- iii. Dari jumlah 271 unit Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	271 unit	Rp 824.123.335
Rusak Ringan	- unit	Rp -
Rusak Berat	- unit	Rp -

#### 7) Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)

Saldo Alat Kedokteran per 31 Desember 2021	7 unit dengan nilai sebesar	Rp 110.990.750
Terdiri dari Saldo Awal sebanyak	5 unit dengan nilai sebesar	Rp 8.690.750
Mutasi Tambah Per 31 Desember 2021	2 unit dengan nilai sebesar	Rp 102.300.000
Mutasi Kurang Per 31 Desember 2021	- unit dengan nilai sebesar	Rp -

Mutasi tambah tersebut meliputi:

Kode	Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
101	Pembelian	Rp 102.300.000	Rp -
<b>Jumlah Penambahan</b>		<b>Rp 102.300.000</b>	<b>Rp -</b>

Penjelasan

- i. Pada Laporan BMN periode Tahun Anggaran 2021 *Audited* terdapat mutasi tambah pada Alat Kedokteran dan Kesehatan berupa pembelian Alat Kesehatan Umum Lainnya sebanyak 2 unit dengan total nilai sebesar Rp102.300.000.
- ii. Pada Laporan BMN periode Tahun Anggaran 2021 *Audited* tidak ada mutasi kurang pada Alat Kedokteran dan Kesehatan.
- iii. Dari jumlah 7 unit Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	7 unit	Rp 110.990.750
Rusak Ringan	- unit	Rp -
Rusak Berat	- unit	Rp -

#### 8) Alat Laboratorium (3.08)

Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tidak memiliki Peralatan dan Mesin berupa Alat Laboratorium.

**9) Alat Persenjataan (3.09)**

Saldo Alat Persenjataan per 31 Desember 2021	9 unit dengan nilai sebesar	Rp 46.691.997
Terdiri dari Saldo Awal sebanyak	9 unit dengan nilai sebesar	Rp 46.691.997
Mutasi Tambah Per 31 Desember 2021	- unit dengan nilai sebesar	Rp -
Mutasi Kurang Per 31 Desember 2021	- unit dengan nilai sebesar	Rp -

Penjelasan

- Pada Laporan BMN periode Tahun Anggaran 2021 *Audited* tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada Alat Persenjataan.
- Dari jumlah 9 unit Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	9 unit	Rp 46.691.997
Rusak Ringan	- unit	Rp -
Rusak Berat	- unit	Rp -

**10) Komputer (3.10)**

Saldo Komputer per 31 Desember 2021	470 unit dengan nilai sebesar	Rp 6.361.786.429
Terdiri dari Saldo Awal sebanyak	445 unit dengan nilai sebesar	Rp 5.962.111.129
Mutasi Tambah Per 31 Desember 2021	25 unit dengan nilai sebesar	Rp 399.675.300
Mutasi Kurang Per 31 Desember 2021	- unit dengan nilai sebesar	Rp -

Mutasi tambah tersebut meliputi:

Kode	Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
101	Pembelian	Rp 399.675.300	Rp -
<b>Jumlah Penambahan</b>		<b>Rp 399.675.300</b>	<b>Rp -</b>

Penjelasan

- Pada Laporan BMN periode Tahun Anggaran 2021 *Audited* terdapat mutasi tambah pada Komputer berupa pembelian *External/Portable Hardisk* sebanyak 4 unit, *Hard Disk* sebanyak 4 unit, Komputer Unit Lainnya sebanyak 1 unit, *Note Book* sebanyak 12 unit, P.C Unit sebanyak 4 unit dengan total nilai sebesar Rp399.675.300.
- Pada Laporan BMN periode Tahun Anggaran 2021 *Audited* tidak ada mutasi kurang pada Alat Komputer.
- Dari jumlah 470 unit Komputer di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	470 unit	Rp 6.361.786.429
Rusak Ringan	- unit	Rp -
Rusak Berat	- unit	Rp -

**11) Alat Keselamatan Kerja (3.15)**

Saldo Alat Keselamatan Kerja per 31 Desember 2021	11 unit dengan nilai sebesar	Rp	147.050.000
Terdiri dari Saldo Awal sebanyak	11 unit dengan nilai sebesar	Rp	147.050.000
Mutasi Tambah Per 31 Desember 2021	- unit dengan nilai sebesar	Rp	-
Mutasi Kurang Per 31 Desember 2021	- unit dengan nilai sebesar	Rp	-

Penjelasan

- Pada Laporan BMN periode Tahun Anggaran 2021 *Audited* tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada Alat Keselamatan Kerja.
- Dari jumlah 11 unit Alat Keselamatan Kerja di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	11 unit	Rp 147.050.000
Rusak Ringan	- unit	Rp -
Rusak Berat	- unit	Rp -

**12) Peralatan Proses/Produksi (3.17)**

Saldo Peralatan Proses/Produksi per 31 Desember 2021	6 unit dengan nilai sebesar	Rp	21.643.800
Terdiri dari Saldo Awal sebanyak	6 unit dengan nilai sebesar	Rp	21.643.800
Mutasi Tambah Per 31 Desember 2021	- unit dengan nilai sebesar	Rp	-
Mutasi Kurang Per 31 Desember 2021	- unit dengan nilai sebesar	Rp	-

Penjelasan

- Pada Laporan BMN periode Tahun Anggaran 2021 *Audited* tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang pada Peralatan Proses/Produksi.
- Dari jumlah 6 unit Peralatan Proses/Produksi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	6 unit	Rp 21.643.800
Rusak Ringan	- unit	Rp -
Rusak Berat	- unit	Rp -

**13) Rambu-Rambu (3.18)**

Saldo Rambu-Rambu per 31 Desember 2021	1 unit dengan nilai sebesar	Rp	2.530.000
Terdiri dari Saldo Awal sebanyak	1 unit dengan nilai sebesar	Rp	2.530.000
Mutasi Tambah Per 31 Desember 2021	- unit dengan nilai sebesar	Rp	-
Mutasi Kurang Per 31 Desember 2021	- unit dengan nilai sebesar	Rp	-

Penjelasan

- Pada Laporan BMN periode Tahun Anggaran 2021 *Audited* tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang pada Rambu-Rambu.
- Dari jumlah 1 unit Rambu-rambu di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1 unit	Rp 2.530.000
Rusak Ringan	- unit	Rp -
Rusak Berat	- unit	Rp -

#### Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Penetapan nilai BMN dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Pusat dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selanjutnya berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya Paragraf 52 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Berbasis Akrual Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Sebagai tindak lanjut dari dua ketentuan di atas, saat ini telah diterbitkan peraturan turunan dari kedua Peraturan Pemerintah terkait, yaitu PMK Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

No	Akun	Masa Manfaat (Tahun)	Saldo Per 31 Desember 2021			
			Kuantitas	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	5	447.581.000	413.509.568	34.071.432
2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	11	31.694.513	28.797.663	2.896.850
3	Alat Bengkel Bermesin	10	4	19.989.700	8.927.665	11.062.035
4	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	5	5.844.300	5.692.500	151.800
5	Alat Ukur	5	2	2.131.500	2.131.500	-
6	Alat Kantor	5	428	2.183.727.166	2.011.878.146	171.849.020
7	Alat Rumah Tangga	5	1.356	4.278.751.100	3.437.810.840	840.940.260
8	Alat Studio	5	71	403.142.844	283.577.851	119.564.993
9	Alat Komunikasi	5	200	420.980.491	383.811.090	37.169.401
10	Alat Kedokteran	5	1	1.093.750	1.093.750	-
11	Alat Kesehatan Umum	5	6	109.897.000	23.498.800	86.398.200
12	Persenjataan Non Senjata Api	3	6	10.173.816	10.173.816	-
13	Alat Khusus Kepolisian	4	3	36.518.181	36.518.181	-
<b>Jumlah (dipindah)</b>			<b>2.098</b>	<b>7.951.525.361</b>	<b>6.647.421.370</b>	<b>1.304.103.991</b>

Commented [R4]: Penyusutan Intra-Aja (CHR 2019 Kata inspektorat Gabungan Intra dan Ekstra)

No	Akun	Masa Manfaat (Tahun)	Saldo Per 31 Desember 2021			
			Kuantitas	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
<b>Jumlah (dipindah)</b>			<b>2.098</b>	<b>7.951.525.361</b>	<b>6.647.421.370</b>	<b>1.304.103.991</b>
14	Komputer Unit	4	224	3.886.950.798	3.400.381.923	486.568.875
15	Peralatan Komputer	4	246	2.474.835.631	2.420.865.370	53.970.261
16	Alat SAR	2	10	10.650.000	10.650.000	-
17	Alat Kerja Penerbagan	10	1	136.400.000	88.660.000	47.740.000
18	Unit Peralatan Proses Produksi	8	6	21.643.800	21.643.800	-
19	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7	1	2.530.000	2.168.571	361.429
<b>Jumlah</b>			<b>2.586</b>	<b>14.484.535.590</b>	<b>12.591.791.034</b>	<b>1.892.744.556</b>

**d. Gedung dan Bangunan (133111)**

Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tidak memiliki Aset berupa Gedung dan Bangunan.

**e. Jalan, Irigasi dan Jaringan (13411)**

Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tidak memiliki Aset berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan.

**f. Aset Tetap Lainnya (135121)**

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021	2 unit dengan nilai sebesar	Rp	1.900.000
Terdiri dari Saldo Awal	2 unit dengan nilai sebesar	Rp	1.900.000
Mutasi Tambah Per 31 Desember 2021	- unit dengan nilai sebesar	Rp	-
Mutasi Kurang Per 31 Desember 2021	- unit dengan nilai sebesar	Rp	-

Rincian atas Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

**1) Bahan Perpustakaan (6.01)**

Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tidak memiliki Aset Tetap Lainnya berupa Bahan Perpustakaan.

**2) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga (6.02)**

Saldo Barang Bercorak per 31 Desember 2021	2 unit dengan nilai sebesar	Rp	1.900.000
terdiri dari Saldo Awal sebanyak	2 unit dengan nilai sebesar	Rp	1.900.000
Mutasi Tambah Per 31 Desember 2021	- unit dengan nilai sebesar	Rp	-
Mutasi Kurang Per 31 Desember 2021	- unit dengan nilai sebesar	Rp	-

Penjelasan

i. Pada Laporan BMN periode Tahun Anggaran 2021 *Audited* tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang pada Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga.

- ii. Dari jumlah 2 unit Rambu-rambu di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	2 unit	Rp 1.900.000
Rusak Ringan	- unit	Rp -
Rusak Berat	- unit	Rp -

**g. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tidak memiliki Konstruksi Dalam Pengerjaan.

**h. Aset Lainnya**

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021	56 unit dengan nilai sebesar	Rp 864.103.900
Terdiri dari Saldo Awal sebanyak	56 unit dengan nilai sebesar	Rp 864.103.900
Mutasi Tambah Per 31 Desember 2021	- unit dengan nilai sebesar	Rp -
Mutasi Kurang Per 31 Desember 2021	- unit dengan nilai sebesar	Rp -

Rincian mutasi Aset Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

**1) Software (162151)**

Saldo Software per 31 Desember 2021	56 unit dengan nilai sebesar	Rp 864.103.900
Terdiri dari Saldo Awal sebanyak	56 unit dengan nilai sebesar	Rp 864.103.900
Mutasi Tambah Per 31 Desember 2021	- unit dengan nilai sebesar	Rp -
Mutasi Kurang Per 31 Desember 2021	- unit dengan nilai sebesar	Rp -

Penjelasan

Pada Laporan BMN periode Tahun Anggaran 2021 *Audited* tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang pada *Software*.

**Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya**

Penetapan nilai BMN dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selanjutnya berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya Paragraf 52 Pernyataan standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Berbasis Akrual Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Sebagai tindak lanjut dari dua ketentuan di atas, saat ini telah diterbitkan peraturan turunan dari kedua Peraturan Pemerintah terkait, yaitu PMK Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

No	Akun	Masa Manfaat (Tahun)	Saldo per 31 Desember 2021			
			Kuantitas	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud		56	864.103.900	740.230.150	123.873.750
<b>Jumlah</b>			<b>56</b>	<b>864.103.900</b>	<b>740.230.150</b>	<b>123.873.750</b>

**2) Lisensi (162161)**

Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tidak memiliki Aset Tetap Lainnya berupa Lisensi.

**3) Aset Tak Berwujud Lainnya (162151)**

Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tidak memiliki Aset Tak Berwujud Lainnya.

**i. Aset Tetap Renovasi (135111)**

Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tidak memiliki Aset Tetap Renovasi.

**j. BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah (166112)**

Pada laporan BMN periode Tahun Anggaran 2021 *Audited* tidak terdapat BMN yang dihentikan penggunaannya dari Operasional Pemerintah.

**3. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Periode Tahun Anggaran 2021 Audited****a. BMN per Akun Neraca**

Nilai BMN pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang periode Tahun Anggaran 2021 *Audited* adalah sebesar Rp2.771.069.956 (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu Persediaan, Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya.

Penyajian Nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
<b>I</b>	<b>Aset Lancar</b>			
1	Persediaan	779.416.150	0	779.416.150
<b>Sub Jumlah (1)</b>		<b>779.416.150</b>	<b>0</b>	<b>779.416.150</b>
<b>II</b>	<b>Aset Tetap</b>			
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	14.402.423.024	82.112.566	14.484.535.590
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap dalam Renovasi	0	0	0
6	Aset Tetap Lainnya	1.900.000	0	1.900.000
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(12.536.542.968)	(55.248.066)	(12.591.791.034)
8	KDP	0	0	0
<b>Sub Jumlah (2)</b>		<b>1.867.780.056</b>	<b>26.864.500</b>	<b>1.894.644.556</b>

III	Aset Lainnya			
1	Software	864.103.900	0	864.103.900
2	Lisensi	0	0	0
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
4	Aset Yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional	0	0	0
5	Akumulasi Amortisasi Software	(740.230.150)	0	(740.230.150)
<b>Sub Jumlah (3)</b>		<b>123.873.750</b>	<b>0</b>	<b>123.873.750</b>
<b>Total</b>		<b>2.771.069.956</b>	<b>26.864.500</b>	<b>2.797.934.456</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan BMN pada UAKPB Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden per 31 Desember 2021 adalah berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
		Rp.	Rp.	Rp.
<b>I</b>	<b>Aset Tetap</b>			
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	12.536.542.968	55.248.066	12.591.791.034
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	KDP	0	0	0
<b>Sub Jumlah (1)</b>		<b>12.536.542.968</b>	<b>55.248.066</b>	<b>12.591.791.034</b>
<b>II</b>	<b>Aset Lainnya</b>			
1	Aset Yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	0	0	0
2	Software	740.230.150	0	740.230.150
<b>Sub Jumlah (2)</b>		<b>740.230.150</b>	<b>0</b>	<b>740.230.150</b>
<b>Total</b>		<b>13.276.773.118</b>	<b>55.248.066</b>	<b>13.332.021.184</b>

**b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan**

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada UAKPB Sekretariat Negara periode periode Tahun Anggaran 2021 *Audited* per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	779.416.150	779.416.150	0
2	Peralatan dan Mesin	14.402.423.024	14.402.423.024	0
3	Aset Tetap dalam Renovasi	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	1.900.000	1.900.000	0
5	Software	864.103.900	864.103.900	0
6	Lisensi	0	0	0
7	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
8	Aset Yang Dihentikan dari Penggunaan operasional Pemerintah	0	0	0
<b>Total</b>		<b>16.047.843.074</b>	<b>16.047.843.074</b>	<b>0</b>

#### 4. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Periode Tahun Anggaran 2021 *Audited*

##### a. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan Nilai BMN secara gabungan selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	%
1	Tahunan TA 2017 <i>Audited</i>	Rp 2.415.466.527		
2	Tahunan TA 2018 <i>Audited</i>	Rp 1.682.004.919	Rp (733.461.608)	-30%
3	Tahunan TA 2019 <i>Audited</i>	Rp 1.662.766.833	Rp (19.238.086)	-1%
4	Tahunan TA 2020 <i>Audited</i>	Rp 2.222.671.226	Rp 559.904.393	34%
5	Tahunan TA 2021 <i>Audited</i>	Rp 2.771.069.956	Rp 548.398.730	25%

##### b. Informasi Lainnya

- 1) Transaksi BMN periode Tahun Anggaran 2021 *Audited* menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dengan update terakhir dari Kementerian Keuangan per 20 Januari 2022 dan telah dilakukan penyusutan dan amortisasi pada aplikasi.
- 2) Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden melakukan pembelian 3 unit BMN berupa *Hardisk Portable* menggunakan MAK 536111 (Belanja Modal Lainnya) sebesar Rp3.996.300, yang seharusnya pembelian BMN tersebut menggunakan MAK 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin). Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah melakukan penyesuaian pencatatan atas pembelian *Hardisk Portable* dan telah tercatat di Aplikasi SAKTI modul Aset Tetap sebagai Peralatan dan Mesin.

Penanggungjawab UAKPB  
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden  
Kepala Biro Umum

**R.H. Bambang B. Nugroho**